

Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

18 Mei 2024, Hal. 587-593

e-ISSN: 2686-2964

Pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan anti-korupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur

Suyitno¹, Putri Maghfiroh², Sheila Indrayani³

PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Ki Ageng Pemanahan No 19 Sorosutan
Yogyakarta^{1,2,3}Email: suyitno@pgsd.uad.ac.id

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah negara yang kompleks. Cara tepat untuk menanggulangi masalah tersebut belum ditemukan. Maka, dibutuhkan berbagai upaya pemahaman pendidikan antikorupsi. Melalui ranah pendidikan baik formal maupun non-formal upaya pemahaman pendidikan antikorupsi dapat dilakukan. Kegiatan tersebut bertajuk “Pelatihan pembuatan model kurikulum Pendidikan Antikorupsi” yang memiliki tujuan untuk memberitahukan betapa pentingnya pendidikan antikorupsi yang harus diterapkan sejak duduk dibangku sekolah sebagai langkah awal untuk memerangi perilaku korupsi dimasa depan salah satunya melalui penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar. Metode pengabdian disusun dalam beberapa langkah, diantaranya yaitu koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap awal meliputi koordinasi dan perijinan dengan rekan yaitu Sekolah Dasar Muhammadiyah Kayen Condongcatur pada 08 Agustus 2023. Tahap pelaksanaan meliputi sosialisasi dan wawancara bersama kepala sekolah dan waka kurikulum SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur pada 24 Agustus 2023, serta mengambil dokumentasi tentang kurikulum pendidikan antikorupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur 08 September 2023. Tahap evaluasi berupa evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan. Hasil pengabdian ini diantaranya untuk mengetahui nilai-nilai antikorupsi telah dimasukkan kedalam kurikulum sekolah dasar dan diharapkan dapat mencetak generasi emas yang berani menolak korupsi. Pemberdayaan level kegiatan pelatihan pembuatan kurikulum antikorupsi dimulai dari level 1 yaitu sosialisasi. Dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah baik di kelas maupun diluar kelas.

Kata kunci : Kurikulum, Pendidikan Antikorupsi, Pelatihan

ABSTRACT

Corruption is a complex state problem. The right way to overcome this problem has not been found. So, various efforts are needed to understand anti-corruption education. Through the realm of education, both formal and non-formal, efforts to understand anti-corruption education can be carried out. The activity is entitled "Training on creating an Anti-Corruption Education curriculum model" which aims to convey the importance of anti-corruption education which must be implemented from school as a first step to combating corrupt behavior in the future, one of which is through implementing anti-corruption education in elementary schools. The service method is structured in several steps, including coordination, implementation and evaluation. The initial stage includes coordination and licensing with partners, namely Muhammadiyah Kayen Condongcatur Elementary School on August 8 2023. The implementation stage includes socialization and interviews with the principal and curriculum leader of Kayen Condongcatur Muhammadiyah Elementary School on August 24 2023, as well as taking documentation about the anti-corruption education curriculum at Muhammadiyah Elementary School Kayen Condongcatur 08 September 2023. The evaluation stage consists of evaluating and preparing activity reports. The results of this service include finding out that anti-corruption values have been included in the elementary school curriculum and it is hoped that this will produce a golden generation that has the courage to reject corruption. The empowerment level of training activities for creating an anti-corruption curriculum starts from level 1, namely socialization. The impact can be felt by the entire school community both in class and outside of class.

Keywords : Curriculum, Anti-Corruption Education, Training

PENDAHULUAN

Urgensi pengabdian pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan anti-korupsi di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kayen Condongcatur sangat penting dilakukan demi membangkitkan kesadaran dan kepedulian guru dan peserta didik terhadap korupsi. Kurikulum Pendidikan antikorupsi tidak hanya tertuju pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja tetapi juga melibatkan perubahan persepsi dan sikap peserta didik terhadap korupsi, serta membantu peserta didik dalam membangun kecakapan untuk melawan tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah sebuah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok demi meraih keuntungan pribadi. Korupsi merupakan perilaku ketidakjujuran yang dapat merusak pola pikir serta kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu tindak kejahatan korupsi juga merugikan bangsa baik secara ekonomi maupun secara social dan lingkungan.

Masyarakat biasa mengungkapkan bahwa mengambil uang negara untuk memperoleh keuntungan secara pribadi merupakan tindakan korupsi. Setiap orang yang melakukan tindakan melanggar aturan ini biasanya disebabkan oleh pengeluaran yang tidak sesuai dengan pendapatan. Permasalahan krusial berupa korupsi yang terjadi di Indonesia ini merupakan masalah yang sangat sulit untuk diberantas. Sudah berbagai macam cara telah digunakan untuk memberantas korupsi, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Pejabat-pejabat besar yang memegang kekuasaan di negara Indonesia banyak yang merugikan negara karena melakukan tindak pidana korupsi. Tidak ada rasa malu yang membuat mereka melakukan tindak kejahatan tersebut. Tidak hanya pejabat negara, pengusaha di Indonesia juga banyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal utama yang membuat mereka tidak sadar telah melakukan tindak pidana adalah kurangnya rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah Tuhan berikan.

Segala bentuk usaha sudah dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi yang semakin merajalela [3]. Lembaga independent yang didirikan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi telah melakukan berbagai Upaya untuk mencegah tindak pidana tersebut. Didirikannya KPK diharapkan dapat memberikan edukasi serta memberantas tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil atau besar. Tugas utama dari Lembaga independent ini adalah melakukan koordinasi dengan cara mengawasi Lembaga yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya. KPK harus melakukan penyelidikan dan penuntutan serta melakukan tindakan pencegahan korupsi.

Triangle of fraud salah satu dari banyaknya teori yang sengaja dikembangkan dengan maksud mencegah terjadinya korupsi. Adapun 3 komponen yang menyebabkan terjadinya korupsi: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Berdasarkan rasio keuangan serta penilaian pada kinerja pemerintah, teori fraud triangle digunakan dalam beberapa penelitian untuk menentukan komponen apa yang menyebabkan korupsi di berbagai lapisan.

Peran strategis yang dimiliki oleh lembaga Pendidikan sangat signifikan dalam menumbuhkan kesadaran antikorupsi [7]. Dengan menanamkan mental antikorupsi sejak dini melalui Lembaga Pendidikan di tingkat dasar, menengah, dan tinggi, generasi emas bangsa diharapkan dapat memiliki rasa dan pandangan yang tegas terhadap korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat membantu tercapainya hal hal sebagai berikut: a. terbangunnya mentalitas anti korupsi peserta didik yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam menghadapi situasi di masa depan, b. memberikan pemahaman peserta didik tentang apa akibat dari tindak pidana korupsi, c. memperbaiki dan memberikan peluang menyelamatkan generasi emas dari tindak pidana korupsi.

Faktor yang berkontribusi pada pengembangan nilai islam dalam Pendidikan islam pendidikan antikorupsi adalah adanya lingkungan yang memfasilitasi penerapan nilai islam dalam pendidikan antikorupsi [2]. Fasilitas dan prasarana sekolah yang mendukung, misalnya makan siang yang disiapkan sekolah untuk membiasakan siswa. Program sekolah

yang dilaksanakan melibatkan refleksi peserta didik tentang kegiatan sholat dan meminta peserta didik mengambil tanggung jawab untuk melakukannya. Maka perlu dibentuknya kurikulum didalam pelaksanaannya program sekolah khususnya pendidikan anti-korupsi.

Kurikulum dalam perspektif pembelajaran diartikan sebagai rencana yang merangkum tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang diperlukan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sesuai dengan konteks berbangsa dan bernegara, kurikulum berdasarkan perspektif ini harus menjadi bagian dari penyemaian dan pembentukan konsepsi dan perilaku individu tentang kesadaran identitas kebangsaan dan kenegaraan. Dalam era revolusi 4.0, pengertian kurikulum harus diartikan sebagai dokumen yang sering berubah atau evolusioner. Kurikulum adalah rancangan yang sengaja dibuat untuk membantu mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum menurut UU No. 20 Tahun 2003 yaitu, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah sesuatu yang memuat materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode, dan evaluasi [4]. Semua itu akan berkembang menjadi sebuah system yang terarah pada satu tujuan Pendidikan.

Kurikulum dapat dibentuk dan diterapkan disemua sekolah di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia. Kurikulum pasti mengandung tujuan pendidikan, yang berarti apa yang ingin dipelajari siswa. Kurikulum adalah “ruh” sebuah Pendidikan yang harus diulas secara kreatif, dinamis, dan berkala untuk menyesuaikan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta pengguna lulusan. Kurikulum dalam Pendidikan sangat berdampak pada kelincahan budaya yang dianggap sebagai mega kompetensi yang harus dimiliki calon profesional di masa depan. Terdapat tiga cakupan kelincahan budaya: a. *cultural agility*, yaitu kemampuan mengontrol dan menyesuaikan diri, b. *cultural adaptation*, kemampuan mengendalikan dan menyesuaikan diri dengan standard nasional, dan c. adaptasi budaya [5]. Namun, dalam penulisan kurikulum biasanya terdapat beberapa kendala salah satunya kurangnya efisiensi pemanfaatan kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum.

Program kebijakan baru yang dibentuk oleh Nadiem Makariem selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Kurikulum Merdeka. Menurut Nadiem guru perlu melakukan pendahuluan sebelum mereka mengajarkannya kepada peserta didik. Tanpa proses penerjemah dari kompetensi inti dan kurikulum yang ada pembelajaran tidak akan terjadi pada tingkat kompetensi guru manapun. Penerapan Kurikulum Merdeka Pendidikan antikorupsi di sekolah dasar sangatlah tepat karena dalam kurikulum Merdeka terdapat pembelajaran berbasis proyek. Hal tersebut dapat mendukung keberhasilan penerapan Pendidikan antikorupsi melalui cara mengoptimalkan Pendidikan antikorupsi melalui program P5 disekolah [1].

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan waka kurikulum pada tanggal 24 Agustus 2023 di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatu, menjelaskan bahwa dalam penerapan nilai-nilai anti-korupsi sudah masuk didalam pembentukan kurikulum sekolah. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Upaya sekolah untuk mencapai prototipe kurikulum Pendidikan anti-korupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatu.

METODE

Pengabdian ini dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke lapangan yaitu SD Muhammadiyah Kayen Condongcatu. Metode pengabdian disusun dalam beberapa langkah, diantaranya yaitu koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi.

- a. Tahap awal meliputi koordinasi dan perijinan akan melakukan pengabdian pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan anti-korupsi dengan rekan yaitu Sekolah Dasar Muhammadiyah Kayen Condongcatur pada 08 Agustus 2023.
- b. Setelah diberikan izin oleh pihak terkait dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan meliputi sosialisasi dan wawancara bersama kepala sekolah dan waka kurikulum SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur, untuk merealisasikan pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan anti-korupsi pada 24 Agustus 2023, serta mengambil dokumentasi lebih lanjut tentang kurikulum pendidikan anti-korupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur yang telah direalisasikan pada 08 September 2023.
- c. Tahap evaluasi berupa pengukuran dan penyusunan laporan kegiatan pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan anti-korupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur.

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan pada tahap evaluasi terdapat kendala yang dialami dalam pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan anti-korupsi yaitu kurangnya efisiensi pemanfaatan kurikulum dan pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam pelatihan pembuatan kurikulum yaitu dengan melakukan pemberdayaan level kegiatan pelatihan pembuatan kurikulum antikorupsi dimulai dari dalam maupun luar kelas, yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah baik dikelas maupun diluar kelas. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan yang sistematis oleh satuan pendidikan dengan melibatkan pendidik sekolah dasar.

Adapula pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pendekatan partisipatif, dengan melibatkan secara aktif kepala sekolah, waka kurikulum dan guru. Kegiatan ini dibantu oleh dua mahasiswa yaitu Putri Maghfiroh dan Sheila Indrayani yang berasal dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Hasil

Setelah dilakukannya pengabdian pada tanggal 08 Agustus 2023, 24 Agustus 2023, dan 08 September 2023 tentang pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan anti-korupsi, pihak Sekolah Dasar Muhammadiyah Kayen Condongcatur mengetahui nilai-nilai anti-korupsi yang telah dimasukkan kedalam kurikulum sekolah, sehingga dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut baik dalam proses pembelajaran ataupun diluar pembelajaran.



Gambar 1. Dokumentasi setelah melakukan pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan anti-korupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur

Pembahasan

Berbeda dengan sebelum dilakukannya pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan anti-korupsi, setelah dilakukannya pengabdian SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur lebih mengetahui fungsi tingkat pemberdayaan dalam penulisan kurikulum, yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum. Sekolah juga dapat mengetahui cara pengelolaan kurikulum secara sistematis yaitu dengan melibatkan pendidik sekolah dasar yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kurikulum. Dengan demikian, pengembangan kurikulum dengan melibatkan pendidik sekolah dasar dapat menjadi peluang untuk membangun kreativitas yang mengarah pada tujuan serta memberikan dampak baik berupa perkembangan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.

Pengabdian ini sangat tepat dilakukan di sekolah dasar karena, sekolah adalah tempat yang ideal untuk membiasakan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Untuk menyiapkan duta-duta antikorupsi sejak dini sekolah menjadi prioritas utama [6].

Dampak

Dampak yang diberikan pengabdian ini kepada sekolah yaitu memberikan pengajaran hidup yang lebih baik, luhur, pantas, dan benar, serta sangat mengagumkan. Pengabdian memberikan pengajaran berupa pengarahan untuk kegiatan pendidikan agar mencapai apa yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan anti-korupsi.

SIMPULAN

Pengabdian ini telah memberitahukan kepada Sekolah Dasar Muhammadiyah Kayen Condongcatur betapa pentingnya pendidikan antikorupsi yang harus diterapkan sejak duduk dibangku sekolah sebagai langkah awal untuk memerangi tindak pidana korupsi dimasa depan salah satunya melalui pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan anti-korupsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami ucapkan khususnya kepada LPPM UAD yang telah memberikan dana sehingga dapat terlaksananya pengabdian ini, terima kasih kepada seluruh warga Sekolah Dasar Muhammadiyah Kayen Condongcatur yang telah bersedia melakukan kerja sama sehingga pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Suyitno, Putri Maghfiroh, dan Sheila Indrayani yang telah berkontribusi dalam pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Evi Hasim. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar PerguruanTinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 68–74. <https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/PSI/article/view/403>
2. Juwita, F. A., Suyitno, S., Prastika, B. A., & Cahya, R. D. (2023). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Siswa Melalui Penanaman Nilai Islam SD Muhammadiyah Noyokerten. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar (JIPPSD)*, 7(1), 237–250. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/indexDOI:https://doi.org/10.24036/jippsd.v7i1>
3. Nur, S. M. (2021). Eduscience : Jurnal Ilmu Pendidikan PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA SISWA SEKOLAH DASAR. *Jurnal Eduscience*, 6, 111.
4. Rosmana, P. S., Iskandar, S., Ayuni, F., Hafizha, F. Z., Fireli, P., & Devi, R. (2023). Kesiapan Sekolah Dalam Proses Penerapan Kurikulum Merdeka Di SD. *Innovative:*

- Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3161–3172.
5. Suryaman, M. (2020). *Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*. 13–28.
 6. Suyitno, Lisa Retnasari, S. (2022). Prototipe Madrasah Antikorupsi di Sekolah Dasar Unggulan Muhammadiyah Lemahdadi Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. *Semin. Nas. Pengabdi. Kpd. Masy*, 851–858.
 7. Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23058>